***PERSPEKTIF*, 10 (2) (2021): 416-423, DOI:** 10.31289/perspektif.v10i2.4602

PERSPEKTIF

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif

Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019

The Effect of Money Politics and Socio-Economic Status on Public Participation in the 2019 Legislative Elections

Martinus Laia, Heri Kusmanto* & Warjio

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 15 Desember 2020; Direview: 15 Desember 2020; Disetujui: 10 Mei 2021

Abstrak

Pada pemilihan umum serentak tahun 2019 yang dilaksanakan diseluruh Indonesia tingkat partisipasi masyarakat kecamatan lolomatua Kabuparen Nias Selatan khususnya pada pemilihan legislatif mencapai 76 % yang telah menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh politik uang dan status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi. Teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini adalah politik uang, pertukaran politik, perilaku politik, pilihan rasional, status sosial ekonomi dan partisipasi. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 100 responden dengan tingkat kesalahan (margen error) 10%. Dalam pemilihan legislatif tahun 2019 khususnya di kecamatan lolomatua, politik uang dan tingkat partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan memberikan pengaruh yang signifikan dan status sosial ekonomi dan tingkat partisipasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Selanjutnya besarnya pengaruh politik uang dan status sosial ekonomi secara bersama-sama/simultan sebesar 57% yang artinya memberikan pengaruh yang kuat terhadap tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih.

Kata Kunci: Politik Uang; Status Sosial Ekonomi; Partisipasi Politik.

Abstract

In the 2019 simultaneous general elections held throughout Indonesia, the level of community participation in the lolomatua sub-district, Kabuparen South Nias, especially in the legislative elections reached 76% who had exercised their voting rights. This study aims to analyze the influence of money politics and socio-economic status on the level of participation. The theories used to explain the problems in this study are money politics, political exchange, political behavior, rational choice, socioeconomic status and participation. Furthermore, the research method used is a quantitative method with a descriptive approach which intends to explain the causal relationship and the influence between variables through hypothesis testing. The number of samples in this study were 100 respondents with a margin of error (error margin) of 10%. In the 2019 legislative elections, especially in the Lolomatua sub-district, money politics and the level of community participation had a positive influence and had a significant effect and the socio-economic status and level of participation had a positive and significant impact. Furthermore, the magnitude of the influence of money politics and socio-economic status together / simultaneously is 57%, which means that it has a strong influence on the level of public participation in voting.

***Keywords**: Money politic; Socio-Economic Status; Political Participation.*

***How to Cite**:* Martinus Laia, Kusmanto, H., & Warjio. (2021). Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019. *PERSPEKTIF, 10 (2): 416-423*

*Corresponding author:
E-mail: herikusmanto@usu.ac.id

ISSN 2085-0328 (Print)
ISSN (Online)

PENDAHULUAN

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi, merujuk pada pemikiran John Locke dan Rousseau keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang (Bactiar, 2014). Demokrasi yang kuat bersumber pada "Kehendak rakyat" dan bertujuan mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat (Arifin Rahman, 2002). Oleh karena itu salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional ataupun daerah yaitu melalui pemilu artinya memilih perwakilannya (DPR/DPRD) dalam menyampaikan aspirasinya melalui pemilu. Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat (Hasibuan et al., 2018; Ivanna et.al., 2018).

Sebagai negara demokrasi yang masih muda, Indonesia masih rentan terjadi politik uang. Secara prosedural, Indonesia telah merintis konsolidasi demokrasi secara baik seiring dengan pelaksanaan pemilu yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah secara berturut-turut pascareformasi dan terakhir pemilu yang dilaksanakan secara serentak tahun 2019 dan telah berjalan dengan baik. Namun secara faktual, perkembangan demokrasi di Indonesia telah dihambat dengan bentuk-bentuk politik uang, tak terkecuali di tingkat akar rumput dalam bentuk jual beli suara. Temuan tentang politik uang di pemilu legislatif tahun 2019 maupun tahun 2014 memiliki pola yang sama, yakni semakin mendekati pemilu, insiden politik uang semakin besar. Pada survei nasional desember 2018, 21,2% pemilih mengaku "sangat sering". "cukup sering" atau "jarang" ditawari uang, lalu meningkat menjadi 29,5% di februari 2019. Mereka yang menjadi sasaran malpraktik elektoral ini sedikit turun di maret 2019 menjadi sekirar 22%. Namun demikian, responden yang mengaku ditarget politik uang kembali naik tajam 33,1% pada survei paska-pemilu 2019(Lembaga Survei Indonesia).

Praktik politik uang merupakan praktek ilegal dalam pemilu seolah-olah mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang kuat, merupakan sesuatu hal yang tidak perlu ditakutkan oleh masyarakat dan menganggap hal itu sesuatu yang lumrah dan wajar (Lukmajati, 2016). Oleh karena masyarakat menganggapnya sebagai budaya tiap pemilu, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik-praktik politik uang. Masyarakat membiarkan praktik-praktik politik uang berkembang dan tidak merasa hal tersebut merupakan tindakan yang perlu dijauhi karena akan merusak citra demokrasi dan menciptakan pemimpin yang tidak jujur,adil dan berunjuk pada pemimpin yang korup. Sampai sejauh ini realitas budaya politik sebagian besar masyarakat khususnya di daerah –daerah pedesaan belum sepenuhnya bersifat paternalistik, belum sepenuhnya bersifat rasional dalam menyalurkan hak-hak politiknya dan kepentingannya. Berdasarkan realitas ini maka proses pemilu belum menjamin kualitas daripada kandidat yang merupakan wakil rakyat (legislatif). Walaupun secara formal-prosedural pemilu diselenggarakan dengan tertib,aman,jujur dan adil, tetapi ketika terjadinya praktik politik uang maka kontestansi yang diharapkan menciptakan wakil rakyat yang berkualitas maka sebaliknya yang terjadi, dan yang punya modal mendapatkan peluang besar dalam kontestasi tersebut (Kusmanto, 2013; Kusmanto, 2014; Suharyanto, 2014)..

Kegiatan-kegiatan yang berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye dan masa-masa tenang, salah satu contoh Pada pemilihan umum 2019, kasus politik uang terjadi di kepulauan Nias menjelang hari H-nya yaitu caleg DPRD Provinsi Sumatra Utara, Damili R Gea yang merupakan Caleg dari partai Gerindra bersama tiga orang lainya pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Satuan Reskrim Polres Nias. Caleg tersebut memberikan uang sebesar Rp 60 juta untuk dibagikan kepada masyarakat untuk memuluskan pemilihan dirinya sebagai Caleg DPRD Sumut (https://www.melekpolitik.com, 2019). Hal serupa yang terjadi di Nias Selatan, terkait pelanggaran pemilu sedikit ada 8 kasus, dan didominasi oleh money politic. Dalam memperkuat argumentasi kasus di atas membuktikan bahwa money politic telah terjadi juga di Nias Selatan oleh penemuan bawaslu (https://m.rri.co.id, 2019).

Bagi caleg yang mempunyai modal besar mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberi barang/uang sebagai biaya transportasi atau beli aqua dimana tujuannya suapaya pemilih tersebut datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya kepada caleg tersebut. Dan biasanya meraka menyasar pada kelompok masyarakat yang bersatatus sosial ekonomi rendah misalnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tidak punya sekolah sebagai sasaran politik uang, karena pada dasarnya masyarakat bawah rata-rata tidak peduli terhadap pemilu dan lebih fokus pada kerja sehari-harinya. Warga yang bersatus sekolah tinggi lebih banyak mengerti dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara khususnya dalam bidang politik karena cenderung dalam kegiatan menimba ilmu sehingga wawasan serta cakrawala pemikiran semakin sadar terhadap pentingnya berpartisipasi meskipun partisipasinya tidak menjadi pemimpin politik, aktivis politik, tetapi mengikuti kampanye dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS), menggunakan hak suaranya, serta mengikuti kegiatan dalam perhitungan suara (Arwiyah, 2012). Melihat dari fenomena bahwa politik uang dan status sosial ekonomi sama-sama mempunyai pengaruh terhadap tinggi-rendah partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan status sosial ekonomi tinggi maka kesadarannya untuk berpatisipasi semakin tinggi dan juga sebaliknya dengan status sosial ekonomi rendah resiko-resiko pelanggaran pemilu (politik uang) terjadi dan aturan sering diabaikan. Dari fenomena di atas penulis tertarik meneliti tentang pengaruh politik uang dan status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk menggambarkan serta menjelaskan pengaruh politik uang status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilian legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan lolomatua yang sudah bisa memilih. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne}$$

Keterangan:
n = Sample
N = Populasi
e = Tingkat kesalahan (*margin error*) e = 10 %

$$n = \frac{5455}{1+5455(0,1)2}$$

$$n = \frac{5455}{1+5455(0,01)}$$

$$n = \frac{5455}{54,56}$$

$$n = 99,98$$

Maka dibulatkan menjadi 100. Jadi sample dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013). Pelaksanaan simple random sampling disebabkan anggota populasi penelitian ini dianggap homogen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji literature-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Internet (*Online Research*) Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data daninformasi tambahan dari situs-situs yang berhubungan dengan penelitian. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Instrument yang digunakan peneliti, dalam mengukur variabel penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Dalam skala likert ada dua pernyataan sikap, yaitu pernyataan yang bersifat mendukung (*favorable*) dan pernyataan yang tidak mendukung (*unfavorable*). Skala disusun untuk mengungkap sikap pro-kontra positif dan negatif, setuju-tidak setuju terhadap objek sosial. Skala berisi pertanyaan-pertanyaan sikap (*attitude statements*), yaitu suatu pernyataan mengenai objek sikap. Selanjutnya ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya analisis regresi linier berganda, uji t (uji parsial), uji F (pengujian secara simultan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Dari hasil olah data pada hasil jawaban responden, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap politik uang menunjukkan praktek politik dalam kategori tinggi, yang mengartikan bahwa praktek politik adalah suatu kebiasaan atau tradisi dalam setiap pemilihan umum bukan hanya di pemilihan legislatif tetapi di pilkada bahkan pada pemilihan kepala desa politik uang sering terjadi. Maraknya politik uang dalam pemilihan umum juga tidak lepas dari fenomena kemiskinan dan budaya masyarakat setempat. Data menunjukkan hasil jawaban responden bahwa sekitar 57% yang menyatakan bahwa praktek politik uang terjadi dalam setiap pemilihan. Artinya tingkat praktek politik uang di kecamatan Lolomatua masif terjadi dengan kategori yang tinggi. Pada pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara politik uang terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua yang artinya semakin tinggi praktek politik uang maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih.

Hal ini dibuktikan hasil t- hitung diperoleh sebesar 9,082 dengan probalitas (sig) 0,000, dibandingkan dengan t – tabel pada α 0,05 diperoleh t-tabel 1.984 hal ini berarti t-hitung> t-tabel dan sig < 0,05 (9,082> 1.984 dan 0,000 < 0,05). Hasil uji-t tesebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel politik uang terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua kabupaten Nias Selatan. Selain itu, nilai R Square yang dihasilkan yaitu sebesar 46% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik ditentukan atau dipengaruhi oleh politik uang, sementara selebihnya 54% dipengaruhi oleh variabel lain.

Selaras dengan hasil pembuktian data analisis, menurut (Agustino, 2009) ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang yaitu faktor internal yang mendorong terjadinya politik uang antara lain karena kesulitan ekonomi dan kemiskinan yang masih melanda besar pemilih baik yang tinggal dipedesaan maupun diperkotaan. Faktor kemiskinan dan beban hidup yang berat membuat mereka mudah dibujuk dan dipengaruhi dengan sejumlah uang dan imbalan materi lainnya. Demikian juga faktor mentalitas dan rendahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan pemilih semakin melengkapi ketidak berdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan politik uang. Sedangkan faktor eksternal yang cukup besar pengaruhnya adalah buruknya kualitas produk perundang undangan yang mengatur politik uang.

Jika dilihat dari faktor diatas yang menyebabkan terjadinya politik uang, pelaku dan penerima saling terikat dan melibatkan dua kepentingan yang berbeda sehingga sulit untuk dihindari yang namanya politik uang. Masyarakat sebagian besar memanfaatkan musim kampanye sebagai peluang untuk mendapatkan uang atau sejumlah materi dengan menawarkan suara kepada kontestan pemilu dengan mengesampingkan bakat dan potensi sang calon. Sehingga begitu terbukanya peluang “Pemilihan umum” yang dilaksanakan dalam sekali 5 tahun tak memikirkan sebab dan akibat atas praktek politik uang yang dilakukan caleg, tim sukses dan simpatisan. Pada masyarakat Lolomatua terjadi hal-hal seperti itu karena kurangnya sosialisasi bahwa bahayanya politik uang dan akses informasi yang masih kurang terutama bagi mereka yang kalangan bawah (petani/buta huruf) sehingga pengetahuan masyarakat tentang politik masih kurang.

Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias

Selatan tergolong tinggi. Pada penelitian ini terdapat beberapa catatan khusus yang peneliti dapatkan selama penelitian yaitu rata-rata masyarakat menerima uang lebih dari satu caleg dan ketika kita tanyakan bagaimana bapak/ibu menentukan pilihan salah satu calon pada hal lebih dari satu bapak/ibu terima uang? Rata-rata menjawab uangnya diambil tapi tidak memilih orangnya artinya bahwa pemilih tidak terpengaruh terhadap uang dalam menentukan pilihan politiknya tetapi hanya sebagai penyemangat dan motivasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Berdasarkan pemaparan diatas, uang adalah salah satu strategi untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada pemilih untuk datang ketempat pemungutan suara. Oleh karena itu berdasarkan rumusan masalah sebelumnya pengaruh politik uang pada pemeilihan legislatif tahun 2019 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarkat dalam memilih. Praktek politik uang yang terjadi di kecamatan Lolomatua menunjukkan bahwa pendekatan pilihan rasional masih menjadi prilaku politik para pemilih. Bahwa dengan adanya pemberian uang uang, barang dan jasa maka akan dengan senang hati masyarakat/pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Dalam memperkuat argument diatas peneliti mengutip teori pilihan rasional (Coleman, 2008), yang menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh. Selanjutnya Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpatisipasi dalam politik.

Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Status sosial ekonomi merupakan tingkatan dari status seseorang secara sosial yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi maupun prestise yang dimiliki. Status sosial merupakan variabel yang ikut diteliti oleh peneliti. Melalui rangkaian penelitian teknik pengumpulan data dan teknik analisa secara deskriptif peneliti memperoleh gambaran mengenai status sosial ekonomi masyarakat Lolomatua berdasarkan jawaban responden yang diperoleh melalui angket menunjukkan bahwa status sosial ekonomi masyarakat Lolomatua tergolong rendah. Mengacu pada sisi kualitas jawaban yang diberikan oleh responden atas item pernyataan tekait dengan variabel status sosial ekonomi sebesar 43% yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat lolomatua rata-rata dengan status sosial ekonomi rendah. Dari rumusan masalah yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa dari hasil uji hipotesis dengan melakukan Uji t, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua kabupaten Nias Selatan.

Hal ini dapat dilihat dari uji t -diproleh dengan nilai t hitung10,551 ditemukan lebih besar dari nilai t tabel 1.984 dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 menunujkkan bahwa variabel status sosial ekonomi dalam pengujian hipotesis secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan lolomatua. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel status sosial ekonomi (X2) terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan (Y).

Pada pembahasan ini sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya tentang adakah pengaruh status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua, maka fokus pada penelitian ini melihat status sosial ekonomi masyarakat lolomatua dengan mengacu pada indikator: Pertama tingkat pendidikan, berdasarkan hasil penelitian jika mengacu pada jawaban responden bahwa tingkat pendidikan memiliki perbedaan antara yang sudah berpendidikan tinggi dengan yang tidak berpendidikan. Mereka yang tidak punya sekolah atau tingkat pendidikan SD-SMP cenderung tidak peduli tentang politik dan tidak mau menahu sedangkan yang tingkat pendidikan SMA s/d S1 mereka aktif dalam kegiatan politik misalnya mau ikut dalam kegiatan pemilu seperti menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, saksi partai/caleg dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Kedua, Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat lolomatua dimana masyarakat yang pekerjaannya petani menganggap bahwa pemilihan legislatif hanya untuk orang tertentu dan tidak ada gunannya untuk memilih sehingga ketika tidak diberi uang maka mereka tidak akan memilih sedangkan mereka yang pekerjaannya PNS, guru honor dan pegawai swasta peduli dan ikut memilih. Ketiga, Pendapatan besarnya penghasilan yang diperoleh masyarakat setiap bulannya, berdasarkan jawaban responden (Petani) tentang pendapatan mereka perbulan adalah 500 ribu/bulan bahkan kadang kurang artinya masayarakat lebih fokus pada kebutuhan pokoknya daripada ikut memilih bahkan mereka menganggap dengan terpilihnya mereka tidak akan mengubah nasib kita ataupun ada perubahan pada tingkat pendapatan kita.

Hal ini menguatkan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini antara status sosial ekonomi terhadap tingkat partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif dan signifikan. Sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti Riza Purnama, Mitchel Tiffany Fortuna Dewi mengenai pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di kecamatan Langensari Kota Banjar pada pemilihan kepala daerah serentak kota Banjar tahun 2018, menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel status sosial ekonomi terhadap variabel partisipasi politik masyarakat (Riza Purnama, 2018). Selanjutnya Taufik Hidayat dalam penelitiannya pada pengaruh variabel status sosial ekonomi berpengaruh siginifikan terhadap tingkat partisipasi politik sebesar 10%. Dan penelitian yang dilakukan oleh Muryanto Amin dan Bobby Irwansyah yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa status sosial ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang (AMIN, 2006).

Berdasarkan hasil diatas diperoleh gambaran bahwa status sosial ekonomi berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam ikut berpatisipasi dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua kabupaten Nias Selatan. Dalam uji hipotesis melalui aplikasi SPSS.24 pada penelitian ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Pengaruh Politik Uang Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Berdasarkan hasil perhitungan uji-F pada pengujian linier berganda sebelumnya diperoleh F hitung sebesar 64,649 dengan sig 0,000, jika dibandingkan dengan F tabel pada α = 0,05 df dalam kuadran (2,98) diperolef F tabel sebesar 3,09 hal ini berarti F hitung > F tabel dan sig 0,000< 0,05 yang mengindikasi bahwa hipotesis I dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang nyata dan signifikan antara politik uang dan status sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan.

Dari hasil jawaban responden terhadap partisipasi politik masyarakat ditemukan bahwa partisipasi masyarakat kecamatan Lolomatua pada kategori cukup tinggi. Jika dilihat dari presentase jawaban responden berdasarkan pernyataan yang diberikan dengan skor jawaban sebesar 50% menggunakan hak politiknya dengan cara memilih berdasarkan hasil tersebut mengindetifikasikan bahwa partisipasi politik masyarakat Lolomatua pada pemilihan legislatif tahun 2019 cukup tinggi Sejalan dengan hasil yang ditemukan diatas peneliti menganalisisis adakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partsipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif sehingga tingkat partisipasinya lolomatua cukuptinggi. Berdasarkan tujuan utama dalam pembahasan ini adalah ingin mengetahui pengaruh politik uang dan status sosial ekonomisecara bersama-sama terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan.

Jika mengacu pada nilaiR squareyang dihasilkan yakni sebesar 57%, terlihat secara kualitas konstribusi kedua variabel bebas terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 sangat besar atau dengan kata lain kedua variabel yaitu politik uang dan status sosial ekonomi memberikan pengaruh yang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Lolomatua sedangkan selebihnya faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini adalah sebesar 44%. Pada bab I pada penelitian

terdahulu telah dijabarkan partipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor sosok calon, faktor visi dan misi, faktor lama tinggal, sosialisasi politik, kesadaran politik, pendidikan politik, jarak TPS mudah dijangkau dan terakhir adanya rasa ingin tahu (Yustinus Usfinit, 2014)

Kegiatan politik masyarakat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, dimana semakin kaya seseorang maka akan semakin tinggi kemampuanya untuk memenuhi tingkatan kebutuhannya (Surbakti, 2003). Tingkah laku caleg dan masyarakat dalam manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik. Jika kita dilihat dari pendekatan perilaku politik menjelaskan bahwa: Secara sosiologis karakter-karakter sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perlaku politik, seperti pendidikan dan pekerjaan. Politik uang dan status sosial ekonomi berperan dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih seperti pada penelitian ini bahwa politik uang dan status sosial ekonomi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan bagi masyarakat yang status sosial ekonomi rendah karena rata-rata masyarakat dengan pendapatan kecil, tingkat pendidikannya rendah dan yang tidak punya sekolah menganggap manfaat yang didapatnya sangat rendah, tidak akan bisa mengubah keadaannya, tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan dan merasa hasilnya hanya memuaskan orang tertentu.

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa, pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat yaitu politik uang (X1) dan Status sosial ekonomi (X2) terhadap tingkat partisipasi masyarakat (Y) secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago dengan judul fenomena politik uang pada pemilihan calon anggota legislatif di desa sandik kecamatan batu laya kabupaten lombok barat. Pada penelitinnya disebutkan bahwa penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang selalu memunculkan masalah masalah baru, termasuk membuka peluang politik uang dimasyarakat. Artinya bahwa masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah (miskin) cenderung berpikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan calon-calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang susah diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan tetap melanda masyarakat (Lina Ulfa Fitriani, 2019). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi merupakan variabel utama yang memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat Lolomatua sedangkan variabel politik uang terjadi akibat dari status sosial ekonomi rendah. Yang artinya bagi masyarakat yang status sosial ekonomi rendah politik uang dapat menentukan dan mempengaruhi perilaku serta sikap masyarakat untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan, dimana semakin tinggi praktek politik uang (bagi-bagi uang) kepada masyarakat maka tingkat keinginan/motivasi pemilih untuk datang ke tempat pemumungutan suara akan semakin tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Lolomatua pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kabupaten Nias Selatan, dimana variabel X1 (Politik Uang) terhadap varabel Y (Partisipasi Masyarakat) terdapat pengaruh positif dan signifikan yang mengidentifikasi bahwa semakin tinggi praktek politik uang (bagi-bagi uang) maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk memilih. Kemudian status sosial ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Lolomatua dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kabupaten Nias Selatan, dimana variabel X2 (status sosial ekonomi) terhadap variabel Y (Partisipasi Masyarakat) terdapat pengaruh positif dan signifikan. Yang artinya semakin tinggi status ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula pula pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih, dan sebaliknya jika status sosial ekonomi rendah (pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan) maka sikap masyarakat tentang politik dan pemilihan umum cenderung apati dan tidak mau tahu bahkan tidak mau ikut memilih karena merasa tidak perlu dan merasa rugi waktunya jika tidak dibayar. Selanjutnya politik uang dan status

sosial ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Lolomatua dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di kabupaten Nias Selatan. Dengan besarnya pengaruh kedua variabel yaitu, variabel politik uang dan status sosial ekonomi yang secara bersama-sama memberikan kontribusi/pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif 2019 di kecamatan Lolomatua kabupaten Nias Selatan sebesar 57%.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2009). *Pilkada dan dinamika politik lokal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amin, I. M. (2006, Juni). Hubungan Tingkat Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005. *Jurnal Wawasan, 12*(1), 1-19.

Arifin Rahman, L. d. (2002). *Sistem Politik Indonesia.* Surabaya: Penerbit SIC7.

Arwiyah, M. Y. (2012). Status Sosial Ekonomi Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Mimbar, 28*(1), 86.

Bactiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia:Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai refresentasi. *Jurnal Politik Profetik, 3*(1), 2.

Coleman, J. S. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations of social Theory) .* Bandung: Nusa Media.

Hasibuan, S.J. Kadir, A. & Nasution, M.H.T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. PERSPEKTIF, 7 (1): 1-5.

https://m.rri.co.id. (2019). Retrieved from https://m.rri.co.id/post/berita/662697/pemilu_2019/empat_kecamatan_di_nias_selatan_tidak_laksnakan_pemungutan_suara.html.

https://www.melekpolitik.com. (2019, 4 16). Retrieved from https://www.melekpolitik.com/2019/04/16lagi-polisi-sumut-tangkap-4-pelaku-money-politics-caleg-gerindra-senilai-rp-60-juta/.

Ivanna, J. Pardede, A.J. & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (1): 25-35.

Kusmanto, H, (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (1): 77-89

Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 41-47.

Lina Ulfa Fitriani, L. W. (2019). Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta KFenomena Politik Uang (Money Politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa sandik Kecamatan batu layar kabupaten Lombok Barat . *Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada pemilihan calon anggota RESIPROKAL , 1*(1), 57.

Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislative 2014 (Studi kasus di Kabupaten Blora) . *Poitika, 7*(1), 22.

Riza Purnama, M. T. (2018). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018. *Jurnal Moderat, 6*, 20.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (2): 166-175

Surbakti, R. (2003). *Memahami Ilmu politik.* Jakarta: Grasindo.

Yustinus Usfinit, A. s. (2014). Yustinus Usfinit, Agung suprojoPerspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Malang. *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik, 3*(1), 41.